

## PROSES PENYELESAIAN KONFLIK PERBATASAN TAJIKISTAN - KIRGISTAN TAHUN 2021

ZULKIFLI<sup>1</sup>

**Abstract:** *The border conflict between Tajikistan and Kyrgyzstan in 2021 became the deadliest border conflict in the history of conflict between the two countries. The conflict was caused by the Tajik government installing surveillance cameras around water facilities on the border, and Kyrgyzstan's opposition to the installation of the cameras. The Kyrgyz side insisted on removing the cameras, resulting in a civil conflict and the conflict continued to grow so that the border military participated in the civil conflict with the initial aim of reducing the intensity of the conflict, but the border military became directly involved in the conflict between the militaries of each country and turned the conflict into a military conflict on the border of the two countries. The conflict that lasted for two days had a huge impact on the relationship between the two countries, Tajikistan and Kyrgyzstan agreed to negotiate and ceasefire to create peace between the two, so that the potential for other conflicts in the future could be minimized. Therefore, the purpose of this research is to provide an overview of the process of resolving border conflicts between Tajikistan and Kyrgyzstan in 2021 case. This research uses descriptive research methods by collecting data through documentation, online labeling research and literature. Then it is analyzed through Loren Wolfer's illustrative method technique by applying the theory used to the case study, so that an explanation of the process of resolving the conflict between the two countries can be explained.*

**Keywords:** *Tajikistan, Kyrgyzstan, Border Conflict, Ethnic Conflict, Ceasefire, Negotiation, Conflict Resolution*

### Pendahuluan

Tajikistan dan Kirgistan adalah dua negara yang memerdekakan diri ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1990. Ketika kedua negara berhasil merdeka muncul permasalahan baru dalam hubungan antara Tajikistan dan Kirgistan, yaitu masalah perbatasan negara yang kompleks dimana kedua negara membagi garis perbatasan sepanjang 971 kilometer dan 400 kilometer diantaranya belum jelas garis batasnya (McGlinchey, 2021).

Pada masa Uni Soviet wilayah negara bagian di atur berdasarkan pada kepentingan ekonomi dan nasional dari Uni Soviet itu sendiri, dan permasalahan sosial tidak menjadi salah satu bahan pertimbangan utama. Isu demarkasi dan delimitasi perbatasan banyak muncul kepermukaan ketika Tajikistan dan Kirgistan merdeka setelah masa kekuasaan Uni Soviet berakhir. Banyak konflik yang terjadi antara masyarakat Tajik dan Kirgiz dikawasan perbatasan kedua negara, dimana kebanyakan konflik terjadi karena masalah konflik antara etnis perbatasan yang memperebutkan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-Mail: zulkiflik482@gmail.com.

lahan, dan masalah kontemporer seperti pendistribusian air dikawasan perbatasan antara Tajikistan dan Kirgistan yang tidak adil.

Pada kasus konflik perbatasan tahun 2021 awalnya disebabkan oleh adanya perebutan air antar etnis dan pemerintah, dimana etnis Tajik menuntut agar mendapatkan hak yang sama dengan etnis Kirgiz sedangkan pemerintah Tajikistan menuntut agar mendapatkan hak pengelolaan pendistribusian atas air di wilayah tersebut. Oleh karena itu keterbatasan air tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa penyebab perebutan air terjadi karena terbatasnya sumber daya air di perbatasan.

Konflik tahun 2021 yang menjadi permasalahan adalah praktik yang dilakukan oleh pengelola distribusi air dari Kirgistan yang mengakibatkan banyak protes dari masyarakat sipil dikawasan pengelolaan air tersebut karena tidak adilnya pendistribusian air ke Tajikistan. Kecurangan dalam pengelolaan air membuat pemerintah Tajikistan dikawasan perbatasan meminta kepada orang-orang Tajik untuk memasang kamera pengawas di beberapa titik sekitar wilayah stasiun pengambilan air di Vaksh dan Isfara dan Ak-sai, tujuan pemasangan kamera pengawas adalah untuk mengamati dan mengontrol akses ke sumber daya air di daerah tersebut (Toktomushev S. , 2021).

Akibat dari pemasangan kamera ini adalah terjadinya konflik antar Etnis Tajik dan Kirgiz dikawasan tersebut karena adanya pertentangan dari etnis Kirgiz mengenai pemasangan kamera pengawas di wilayah penyedia fasilitas distribusi air. Konflik pecah pada 28 April antar etnis yang banyak menggunakan batu, pentungan dan alat - alat pertanian untuk berkonflik, dan pada 29 April 2021 dini hari militer yang bertugas di perbatasan hadir dalam konflik karena konflik yang sudah tidak kondusif dengan tujuan awal untuk mendamaikan akan tetapi militer perbatasan ikut terlibat aktif dalam konflik sipil tersebut sehingga konflik banyak menggunakan senjata api dan alat berat militer, yang kemudian mentransformasikan konflik dari konflik sipil menjadi konflik militer antara kedua negara diperbatasan.

Menghadapi permasalahan konflik sipil dan militer yang terjadi di perbatasan, pada tahap deeskalasi konflik, pemerintah Tajikistan dan Kirgistan merespon secara positif terhadap konflik yang ada dengan adanya keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai dengan melakukan dialog atau negosiasi baik itu di tingkat kepala negara maupun tingkat menteri/pejabat negara lainnya, meskipun kedua negara sebelumnya telah mengirimkan bantuan militer ke perbatasan untuk terlibat dalam konflik perbatasan sehingga membuat konflik semakin kompleks dan mengakibatkan banyak korban jiwa dalam konflik tersebut

## **Kerangka Teori**

### **Teori Resolusi Konflik**

Dalam membantu menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori resolusi konflik yang dikembangkan oleh Oliver Ramsbotham, Hugh Miall, & Tom Woodhouse dalam buku *Contemporary Conflict Resolution 3rd Edition (2011) pada Chapter 4 Understanding Contemporary Conflict* yang mengungkapkan dalam penyelesaian konflik harus berfokus pada

ketidakepahaman radikal atau akar dari masalah yang ada baru membahas mengenai kesamaan dari masing-masing pihak yang berkonflik, sehingga dapat menjadi dasar dalam usaha mencapai perdamaian (Ramsbotham, 2011).

## **Metode**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan oleh Tajikistan dan Kirgistan dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh kedua negara ketika berkonflik di perbatasan pada tahun 2021. Jenis dan sumber daya yang digunakan adalah data sekunder karena peneliti melihat ketersediaan data yang memudahkan penulis dalam mengakses berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan dan dokumen-dokumen resmi yang meliputi perjanjian, laporan diplomatik dan dokumen kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumentasi, yang dapat dilakukan secara online labeling research dan kepustakaan, serta teknik analisis data *Illustrative method* dari Loren Wolfer yang digunakan untuk mengaplikasikan teori yang digunakan dalam studi kasus yang diangkat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konflik Tajikistan dan Kirgistan tahun 2021**

Lembah Ferghana dan Provinsi Batken menjadi salah satu titik yang paling rentan untuk pecahnya konflik di antara Tajikistan dan Kirgistan. Lembah Ferghana juga menjadi tempat terjadinya konflik antar etnis utama yang ada di perbatasan Tajikistan dan Kirgistan, ketiga kelompok etnis utama yang ada dalam wilayah ini adalah Kirgiz, Uzbek dan Tajik (Ravees, 2005). Lembah Ferghana adalah dataran besar seluas 22.000 km<sup>2</sup> yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa terutama dalam bidang pertanian, dengan hasil utama berupa kapas, beras, gandum, buah-buahan dan sayuran (Toktomushev K. , 2018). Oleh karena sumber daya alam inilah yang membuat menyebabkan banyak kasus perebutan lahan di perbatasan sering terjadi antara Tajikistan dan Kirgistan. Konflik Tajikistan dan Kirgistan pertama kali terjadi pasca Uni Soviet dimulai pada 22 April 1999, ketika pasukan Kirgistan memutuskan untuk melakukan penyerbuan ke desa Vorukh di Tajikistan, desa ini terletak di wilayah pegunungan yang terpencil dan dihuni oleh mayoritas etnis Tajik sehingga terjadi konflik militer dikawasan tersebut. Kemudian di Tahun 2004 konflik diperbatasan antara Tajikistan dan Kirgistan terjadi perang Aprikot yang terjadi karena perebutan lahan di perbatasan antara Etnis Tajik dan Kirgiz sehingga menyebabkan konflik sipil dan bereskalasi menjadi konflik antar kedua negara. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2014 terjadi konflik perebutan lahan dan konflik militer diperbatasan, yang dikenal dengan 'Perang Ketmen' selain itu juga ada tuduhan dari militer Tajikistan menuduh Kirgistan telah membangun dinding pembatas di sepanjang perbatasan dan melanggar wilayah Tajikistan sehingga terjadi konflik antar militer diperbatasan.

Pasca konflik 2014 pasukan penjaga perbatasan Tajikistan dan Kirgistan secara teratur terlibat dalam bentrokan bersenjata diperbatasan dengan menggunakan alat berat militer untuk saling menyerang, terdapat total 163 bentrokan yang tercatat dalam bentrokan perbatasan hingga tahun 2021 (Olimov, 2022). Konflik tahun 2021 menjadi konflik perbatasan kedua negara yang terjadi karena perebutan sumber daya air diperbatasan di wilayah Ak-Sai karena adanya aksi pemasangan kamera pengawas yang dilakukan oleh pihak Tajikistan disepanjang fasilitas air di perbatasan, sehingga menuai

pertentangan dari pihak Kirgistan sehingga terjadi konflik sipil dan bertransformasi menjadi konflik militer kedua negara diperbatasan. Konflik tahun 2021 juga menjadi konflik yang paling mematikan karena memakan korban jiwa dengan total 53 warga Tajikistan dan 31 warga Kirgistan serta 183 orang mengalami luka-luka, 50.000 warga perbatasan mengungsi ke tempat yang lebih aman (RFE/RL Kyrgyz Service, 2021).

### **Akar Konflik**

Dalam kasus konflik yang terjadi antara Tajikistan dan Kirgistan pada tahun 2021, konflik disebabkan oleh tiga hal, pertama adalah masalah belum ditetapkannya kesepakatan mengenai garis batas negara dimana kedua negara membagi garis batas sepanjang 971 km dan 400 km diantaranya belum di sepakati (McGlinchey, 2021). Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai penentuan garis batas negara. Tajikistan yang berpedoman pada dokumen 1942-1946 dalam menentukan garis batas. Sedangkan Kirgistan sendiri melakukan klaim bahwa garis batas negara yang dibuat pada era Uni Soviet tidak relevan karena dalam perkembangannya banyak wilayah Kirgistan yang masuk dalam wilayah Tajikistan jika berdasarkan pada dokumen 1942-1946 sehingga merugikan pihak Kirgistan yang akan kehilangan wilayahnya di perbatasan jika setuju dengan proposal dari Tajikistan.

Secara Geografi di perbatasan Tajikistan dan Kirgistan terdapat banyak wilayah kantong<sup>2</sup> dan enklave<sup>3</sup> yang menjadi penghambat dalam penentuan garis batas negara. Contohnya adalah wilayah Vorukh yang benar-benar dikelilingi oleh wilayah Tajikistan, dan Batken yang terdapat wilayah administratif Tajikistan yang juga dikelilingi oleh daratan Kirgistan. Wilayah kantong juga menjadi titik yang sensitif akan konflik, masih banyak wilayah pegunungan yang belum di sepakati sebagai titik garis batas kedua negara, sehingga menyebabkan potensi terjadinya konflik perebutan lahan sipil maupun kontak militer terjadi disepanjang wilayah ini. Oleh karena kondisi perbatasan Tajikistan dan Kirgistan yang belum jelas dan perbatasan yang kompleks memberikan implikasi kepada masyarakat yang tinggal dikawasan perbatasan seperti hubungan antar etnis yang tidak baik sehingga sering terjadi konflik sipil karena perebutan lahan dan sumber daya alam.

Dalam kasus tahun 2021 konflik etnis antar Tajik dan Kirgiz yang juga disebabkan oleh adanya perebutan sumber daya alam yang ada di perbatasan yaitu sumber daya air dikawasan bendungan air di sungai Isfarah, Ak-sai, hal ini terjadi karena adanya perasaan saling tidak percaya antara satu sama lain dalam masyarakat Tajik dan Kirgiz yang hidup dan tinggal dikawasan tersebut. Terdapat ketimpangan dalam pendistribusian air dikawasan perbatasan untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan penggunaan sehari-hari masyarakat lokal. Sehingga muncul tindakan pemasangan beberapa kamera pengawas yang dilakukan oleh orang Tajik di sekitar wilayah pengambilan air bersama di perbatasan atas permintaan pemerintah lokal Tajikistan di perbatasan (Sullivan C. J., 2021).

Respon dari orang Kirgiz sendiri adalah menentang akan adanya kamera tersebut dan menuntut agar kamera pengawas itu dilepaskan, karena mereka merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang Tajik akan melanggar privasi orang Kirgiz

---

<sup>2</sup> Wilayah Kantong adalah wilayah suatu negara yang mencorok masuk kedalam wilayah negara lain.

<sup>3</sup> Enklave adalah wilayah/teritori suatu negara yang sepenuhnya dikelilingi oleh negara lain.

dikawasan pengambilan air tersebut. Akan tetapi tidak ada respon positif dari orang Tajik sehingga terjadi bentrokan sipil antara orang Tajik dengan Kirgiz, dan dalam konflik sipil yang berlangsung hingga tengah malam 28 april 2021, yang awalnya hanya menggunakan senjata tradisional seperti perkakas dan alat-alat perkebunan lainnya bertransformasi menjadi konflik yang menggunakan senjata api, sehingga kehadiran militer diperlukan untuk menghentikan konflik yang semakin berbahaya.

Militer penjaga perbatasan baik itu dari Tajikistan maupun Kirgistan terlibat dalam konflik dengan tujuan awal adalah untuk menekan intensitas konflik yang ada, akan tetapi militer perbatasan pada akhirnya terbawa arus dan ikut terlibat langsung dalam konflik sipil tersebut. Sehingga konflik ini bukan lagi konflik sipil akan tetapi telah berubah menjadi konflik militer dikawasan perbatasan Tajikistan dan Kirgistan.

Kondisi konflik semakin diperparah dengan kehadiran bantuan militer dari pusat dikawasan perbatasan tempat terjadinya konflik, dimana kedua pemerintah memutuskan untuk mengirimkan bantuan militer untuk membantu militer perbatasan masing-masing dalam konflik perbatasan tersebut. Keputusan pengiriman bantuan militer ke kawasan konflik terjadi pada 29 april inilah yang membuat hubungan Tajikistan dan Kirgistan menjadi semakin panas dikawasan perbatasan.

Hasil dari konflik yang terjadi adalah banyak kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak, mulai dari kerusakan fasilitas umum dan menyebabkan secara terdapat 17 rumah yang terbakar akibat dari konflik dikawasan Kok-Terek (Kirgistan) dan 135 rumah di Marksar, Arka yang dihancurkan oleh pasukan militer Tajikistan dan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit juga hancur (Sultanalieva, 2021). Sedangkan dari pihak Tajikistan sendiri hanya melaporkan terdapat satu sekolah yang hancur akibat konflik yang terjadi (Williamson, 2021).

Adapun yang menjadi penyebab langsung terjadinya konflik pada tahun 2021 adalah karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh Kirgistan dalam pendistribusian air yang menyebabkan protes dari pihak Tajikistan. Keterbatasan sumber daya air bukan menjadi penyebab adanya kecurangan dalam pendistribusian air karena berdasarkan pada data yang diterbitkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) PBB mengatakan bahwa total air terbaharukan per tahun 2017 yang ada di Kirgizstan sebesar 4,336.00 m<sup>3</sup> dan Tajikistan sebesar 3,095.00 m<sup>3</sup> (Toktomushev K. , 2017). Sistem pembagian air juga telah di tetapkan sejak era Uni Soviet yang dikenal dengan Protokol 4 November 1980 tentang distribusi air dari sungai-sungai di lembah Fergana ke negara sekitarnya, air dari sungai Isfara akan di distribusikan sebagai berikut; Tajikistan-55%; Kirgistan-37% dan Uzbekistan-8% (GIZ, 2014).

Permasalahan air muncul karena adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak Kirgistan yang selalu mencoba untuk menguasai fasilitas air diperbatasan demi keuntungan sendiri, dan melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Kirgistan mendirikan pos perbatasan di sekitar wilayah distributor air Ak-Sai dan tidak mengizinkan perwakilan lembaga manajemen air dari Tajikistan dan Uzbekistan untuk memantau proses distribusi dan debit air. Hal ini dilakukan oleh Kirgistan karena dengan tujuan untuk menguasai sepenuhnya fasilitas distribusi air di perbatasan, dan bebas menentukan besaran debit air yang di distribusikan ke negara tetangganya (Olimov, 2022).

### **Lokasi Terjadinya Konflik**

Terdapat 13 titik utama terjadinya konflik antar kedua negara yaitu; Ak-Sai, Bakai, Kapchygai, Min Bulak, Min Oruk, Samarkandek, Chorbog, Dostuk, Arka, Bordorduk, Khistevarz, Jalan Maksat- Jashtyk dan Ovchi Kal'acha. Titik awal konflik terjadi konflik ada dikawasan Ak-sai kemudian menyebar ke beberapa wilayah di bagian utara Tajikistan, sampai wilayah Ovchi Ka'lacha. Pada awal konflik pecah antara Tajikistan dan Kirgistan konflik terjadi dikawasan Ak-Sai, lembah Ferghana di sungai Isfarah.

Persebaran konflik yang terjadi sangat cepat hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya keterlibatan sosial media dalam menyebarkan informasi oleh masyarakat sipil. Sosial media menjadi salah satu faktor pendukung penyebaran informasi dengan cepat dan tidak adanya filterisasi informasi yang dilakukan oleh pengguna media sosial yang mengakibatkan kesalah pahaman di media sosial.

Media sosial digunakan oleh kedua belah pihak untuk melakukan propaganda dan saling memprovokasi satu sama lain di media sosial. Perang meme juga terjadi diberbagai platform media sosial seperti Facebook dan Twiter. Dampak dari perang media sosial ini adalah masyarakat sipil yang ada di perbatasan saling memprovokasi satu sama lain di dunia nyata sehingga perang sipil terjadi di beberapa titik di perbatasan yang mempertemukan etnis Tajik dan Kirgiz.

### **Tipe Konflik**

Konflik yang terjadi antara Tajikistan dan Kirgistan pada April 2021 merupakan tipe konflik terbuka. Konflik antara Tajikistan dan Kirgistan dikatakan sebagai konflik terbuka karena pada april 2021 terjadi bentrokan fisik dan pertempuran yang menggunakan senjata api, antara militer yang berjaga di perbatasan kedua negara. Militer penjaga perbatasan terlibat secara aktif dalam konflik yang ada, sehingga membuat struktur kekerasan dan kesenjangan yang ada menjadi semakin kuat. Kondisi perbatasan semakin diperparah ketika pemerintah pusat dari Tajikistan dan Kirgistan memutuskan untuk mengirimkan bantuan personil militernya ke perbatasan dengan tujuan untuk membantu militer penjaga perbatasan yang sedang terlibat dalam konflik dengan negara tetangganya (Andriansyah, 2021).

Konflik april 2021 antara Tajikistan dan Kirgistan tidak hanya memberikan dampak bagi kedua negara yang berkonflik akan tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Konflik antar Tajikistan dan Kirgistan membuat ketidakpastian dan menciptakan ketegangan diantara negara-negara tetangga kedua negara ini. Selain itu konflik April 2021 membuat kawasan Asia Tengah mengalammi gangguan ekonomi karena adanya ketergantungan mereka pada hubungan dagang dengan Tajikistan dan Kirgistan, dan ketika konflik terjadi kegiatan ekonomi kedua negara terputus dan mengakibatkan ekspor dan impor produksi negara tetangga ke Tajikistan dan Kirgistan juga berhenti.

### **Pihak Ketiga Dalam Konflik**

Pada kasus konflik yang terjadi pada tahun 2021, saat Tajikistan dan Kirgistan berada dalam masa-masa de-eskalasi konflik dan gencatan senjata, ada beberapa negara yang ingin terlibat dalam proses penyelesaian konflik perbatasan yang sedang di alami oleh Tajikistan dan Kirgistan. Terutama negara-negara tetangga seperti Rusia dan

Kazakhstan, dan bahkan organisasi regional juga ingin ikut terlibat dalam penyelesaian masalah konflik yang dihadapi oleh Tajikistan dan Kirgistan.

Negara pertama yang memberikan tawaran untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik adalah Rusia yang pada saat itu sedang dalam masa persiapan untuk memperingati hari kemenangan Rusia yang akan dilaksanakan pada 9 Mei, melalui juru bicara Kremlin mengatakan bahwa pihak Rusia telah mengundang negara-negara di Asia Selatan untuk hadir dalam acara tersebut. Terlebih khusus kepada pemimpin negara Tajikistan dan Kirgistan, pihak Kremlin telah membuat agenda khusus untuk membahas mengenai konflik perbatasan yang terjadi antara Tajikistan dan Kirgistan. Sayangnya Kirgistan tidak dapat hadir dalam acara tersebut tanpa ada alasan yang pasti, sedangkan Rahmon yang menghadiri acara tersebut memiliki kesempatan untuk berbicara dan berdiskusi dengan Putin mengenai pertempuran 28-29 April di perbatasannya dengan Kirgistan (Pannier, 2021).

Putin menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam konflik perbatasan tersebut akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Hal ini terjadi karena pihak Kirgistan tidak setuju dengan agenda tersebut, Kirgistan merasa bahwa kehadiran Rusia dalam penyelesaian konflik tidak akan memberikan keuntungan bagi negaranya dan Kirgistan juga merasa tidak akan adil jika melibatkan Rusia dalam mediasi tersebut, dengan alasan mempertimbangkan posisi Rusia yang memiliki basis militer di Tajikistan (Reuters, 2021) sehingga Rusia ditakutkan akan lebih berpihak kepada Tajikistan dan akan merugikan pihak Kirgistan dalam negosiasi jika dilakukan.

Selain Rusia, Kazakhstan juga melakukan panggilan telepon kepada presiden Tajikistan dan Kirgistan mengenai konflik yang terjadi di perbatasan mereka. Qasym Zhomart Toqayev melakukan panggilan telepon kepada presiden Japarov pada 1 Mei untuk menyampaikan bela sungkawanya kepada korban dalam pertempuran yang terjadi di provinsi Batken, dan menyatakan kesanggupannya untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik serta mengatakan bahwa Kazakhstan siap untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Kirgistan. Toqayev juga melakukan panggilan yang sama kepada Rahmon, Presiden Tajikistan.

Toqayev menawarkan diri untuk menengahi pembicaraan antara Tajikistan dengan Kirgistan mengenai konflik yang terjadi di perbatasan mereka, akan tetapi dari pihak Dushanbe tidak pernah memberikan pernyataan resmi mengenai jawaban atas tawaran yang diberikan oleh pihak Astana untuk menjadi mediator.

Selain tawaran dari kepala negara-negara tetangga untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik Tajikistan dan Kirgistan, Menteri luar negeri Rusia juga memberikan tawaran kepada Tajikistan dan Kirgistan untuk membawa kasus mereka ke CSTO (Collective Security Treaty Organization) untuk di jadikan sebagai tempat musyawarah, akan tetapi baik Tajikistan maupun Kirgistan menolak dan lebih suka menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Tajikistan dan Kirgistan bukan tanpa ada sebab atas penolakan tersebut, keduanya belajar dari kasus Armenia dan Azerbaijan yang sebelumnya di bawa ke OSCE (Organization for Security and Co-Operation in Europe) dan berakhir gagal menjaga perdamaian kedua negara tersebut. CSTO juga tidak memiliki kondisi yang lebih baik dari OSCE, dimana CSTO sedang mengalami

perebutan kursi kekuasaan di dalam sekretariatnya ketika konflik terjadi di Tajikistan dan Kirgistan (Martin, 2021). Sedangkan organisasi Regional SCO (Shanghai Cooperation Organization) tidak pernah memberikan komentar resmi terhadap perdamaian yang ada di Tajikistan dan Kirgistan, meskipun negara anggota SCO melakukan pertemuan pada bulan Mei 2021 dan kekerasan yang ada di perbatasan Tajikistan dan Kirgistan tidak pernah disebutkan (Sheng, 2021).

Alasan lain atas penolakan keterlibatan organisasi CSTO adalah dalam sejarah konflik perbatasan antara Tajikistan dan Kirgistan, CSTO hanya memberikan solusi untuk jangka pendek sehingga mengakibatkan konflik kembali terjadi. Oleh karena itu kedua negara ini lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara negosiasi secara bilateral tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga dalam prosesnya, agar penyelesaian konflik lebih berdasarkan pada kepentingan nasional kedua belah pihak.

### **Proses Penyelesaian Konflik**

Pemerintah Tajikistan dan Kirgistan ketika konflik berada pada tahap deeskalasi memberikan respon yang positif terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dimana pemerintah Tajikistan dan Kirgistan setuju untuk melakukan negosiasi dalam proses penyelesaian konflik mereka diperbatasan pada tahun 2021. Konflik perbatasan yang sudah tidak terkontrol serta banyaknya kerusakan fasilitas di perbatasan membuat kedua negara yang berkonflik untuk melakukan diskusi bersama demi mendapatkan jalan keluar bersama dalam konflik yang telah mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Langkah pertama yang dilakukan oleh kedua kepala negara untuk menghentikan konflik adalah negosiasi melalui panggilan telepon yang dilakukan oleh presiden Sadyr Japarov dari Kirgistan dan Emomali Rahmon dari Tajikistan. Diskusi mengenai masalah yang mereka hadapi terjadi pada 29 April, hasil dari diskusi melalui panggilan telepon adalah keduanya sepakat untuk mengadakan gencatan senjata agar konflik yang terjadi tidak terus bereskalasi dan menyebabkan lebih banyak kerugian bagi kedua belah pihak.

Hasil dari kesepakatan gencatan senjata terdapat dua poin utama yaitu; (1.) Pasukan militer yang ada di perbatasan selama periode konflik ditarik dari perbatasan, kedua negara menarik sebagian besar militernya kembali ke markas utama militer masing-masing. (2.) Kedua belah pihak sepakat hanya menyisakan pasukan militer untuk menjaga perbatasan mereka, tidak ada tentara atau militer yang akan tinggal di perbatasan kecuali yang memang bertugas dikawasan tersebut. Tujuan dari penarikan militer ini adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak militer yang tidak perlu di perbatasan, sehingga kemungkinan untuk terjadinya konflik baru dapat diminimalisir.

Gencatan senjata yang disepakati pada 29 April gagal di hari yang sama, kesepakatan gencatan senjata pertama gagal karena adanya tindakan militer Kirgistan yang mencoba untuk menguasai stasiun pengambilan air Golovnoi di distrik Leilek. Konflik antar militer Tajikistan dan Kirgistan di Distrik Leilek tidak sebesar konflik sebelumnya karena hanya melibatkan beberapa anggota militer dari kedua negara dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Pada 30 April 2021 Presiden Emomali Rahmon dan Sadyr Japarov sepakat untuk bertemu secara langsung di wilayah netral pos pemeriksaan Kyzyl-Bel untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai permasalahan konflik yang terjadi disepanjang perbatasan negara

mereka Kedua presiden tersebut sepakat untuk melanjutkan upaya bersama untuk menstabilkan situasi yang sedang berlangsung dan menyelesaikan demarkasi dan delimitasi perbatasan antara kedua negara dengan jelas. Dan setuju untuk melanjutkan kembali gencatan senjata yang sempat gagal dan melanjutkan penarikan semua pasukan militer dari garis perbatasan negara masing-masing secara bertahap kecuali pasukan yang memang bertugas untuk berjaga di perbatasan masing-masing.

Meskipun begitu, pada 1 Mei 2021 pasca gencatan senjata, pihak Kirgistan mengklaim bahwa mereka mendapatkan serangan dari pasukan perbatasan Tajikistan, Pasukan Tajikistan menembaki kendaraan Kirgistan dari sisi perbatasan mereka (Aljazeera, 2021). Kondisi hubungan antara Tajikistan dan Kirgistan yang ada di perbatasan masih belum reda membuat kedua presiden kedua negara untuk membuat agenda pertemuan kembali secara online. Presiden dari dua negara yang berkonflik yaitu Tajikistan dan Kirgistan kembali mengadakan diskusi melalui panggilan telepon pada hari sabtu 1 Mei 2021 untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang tidak perlu dikawasan perbatasan mereka, terutama kawasan yang memang rawan terjadinya konflik (Aljazeera, 2021). Akan tetapi dari diskusi yang dilakukan secara online tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang signifikan yang dapat menstabilkan hubungan kedua negara. Akan tetapi penarikan militer terus dilanjutkan hingga secara keseluruhan militer kembali ke Ibukota masing-masing negara pada 2 Mei 2021.

Setelah lebih dari sebulan pasca konflik, Presiden Kirgistan Sadyr Japarov dalam rangka memperbaiki hubungan dengan negara tetangganya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Ibukota Tajikistan, Dushanbe, untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Emomali Rahmon (Putz, 2021). Pertemuan yang berlangsung pada 28-29 juni dengan menghasilkan pernyataan bersama yang menegaskan kembali komitmen Tajikistan dan Kirgistan untuk membangun dan menjalin hubungan bertetangga yang baik.

Hasil dari pertemuan itu berdasarkan pada postingan yang dipublikasikan pada website resmi pemerintah Kirgistan memiliki 25 poin utama dimana sebagian besar pada poin-poin tersebut adalah basa-basi diplomatik yang sangat alot seperti “Hubungan Kirgistan-Tajikistan didasarkan pada ikatan sejarah berabad-abad, nilai-nilai budaya dan spritual bersama” dan pada poin tersebut juga menekankan mengenai perlunya Tajikistan dan Kirgistan untuk mempercepat negosiasi dan demarkasi perbatasan.

Dalam pernyataan pers yang dipublikasikan oleh website resmi pemerintah Tajikistan, Presiden Tajikistan Rahmon mengatakan bahwa “Tajikistan dan Kirgistan perlu untuk mengadakan pertemuan rutin Komisi Antar Pemerintah tentang pertimbangan komprehensif kerjasama bilateral” (Government of Tajikistan, 2021). Untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kedua negara sehingga kesepahaman mengani sudut pandang masing-masing negara dapat menjadi bahan untuk melakukan negosiasi.

Pada pertemuan 29 Juni juga menghasilkan sebuah kesepakatan mengenai mekanisme penggunaan air, kedua kepala pemerintah bersepakan untuk pengadaan instrumen hukum yang dirasa efektif dan mekanisme kelembagaan yang dikenal dengan nama Interdepartment of Tajik-Kirgiz Working Group (Government of Tajikistan, 2021).

Kelompok kerja ini sebenarnya telah ada sebelumnya, akan tetapi tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga peristiwa-peristiwa seperti insiden 28 april 2021 dapat terjadi, oleh karena itu pemerintah kedua negara sepakat untuk memperbaiki sistem yang ada untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan oleh hal yang sama untuk kedua kalinya. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk mengatur penggunaan dan distribusi sumber daya air dan energi yang terintegrasi dan rasional seperti di cekungan laut Aral, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dikawasan ini.

Pada akhir sesi pertemuan bilateral negara ada beberapa poin yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu; (1) Perjanjian kerja sama di bidang pensiun dan asuransi sosial antara kementerian kesehatan dan pembangunan sosial Kirgistan dan badan asuransi sosial dan pensiun dibawah pemerintah Tajikistan. (2) Nota kerjasama di bidang layanan sipil antara Layanan Personalia Negara Republik Kirgistan dan Badan Layanan Negara dibawah Presiden Tajikistan. (3) Nota kerjasama pada bidang pemuda antara kementerian kebudayaan, Informasi, Olahraga dan Kebijakan pemuda Kirgistan dan Komite Urusan Pemuda dan Olahraga di bawah Pemerintah Tajikistan. (4) Nota kerjasama antara Kantor Berita Nasional Kirgistan Kabar dan Kantor Berita Nasional Tajikistan Khovar (Kudryavtseva, 2021).

Meskipun melalui penandatanganan kerjasama diberbagai bidang yang dilakukan oleh kedua negara adalah untuk membangun hubungan yang positif melalui kerjasama sehingga ada rasa saling percaya satu sama lain, sehingga potensi konflik dapat di minimalisir akan tetapi melalui kesepakatan yang dilakukan oleh kedua negara menunjukkan bahwa kedua negara tidak terlalu memberikan perhatian khusus pada konflik perbatasan yang pecah pada April 2021.

Pemerintah Tajikistan dan Kirgistan dalam beberapa pertemuan yang dilakukan pasca konflik tidak membuat kebijakan yang jelas mengenai arah tindakan yang akan mereka ambil kedepannya agar konflik tidak terjadi lagi, tidak terdapat bahasan lebih lanjut mengenai demarkasi dan delimitasi garis batas perbatasan negara mereka. Mereka membiarkan garis batas tersebut tetap berada pada titik tersebut tanpa adanya perkembangan, sehingga potensi terjadinya konflik di masa depan masih sangat besar.

Salah satu contoh dampak dari tidak adanya kesepakatan untuk memperjelas garis batas negara di perbatasan Tajikistan dan Kirgistan adalah insiden kontak militer yang kembali terjadi pada 9 Juli 2021, insiden ini adalah penembakan militer yang dilakukan oleh tentara Tajikistan kepada militer Kirgistan di perbatasan kedua negara. Menanggapi insiden 9 Juli, Tajikistan dan Kirgistan hanya membuat kesepakatan agar gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya tetap dilanjutkan dan mengesampingkan insiden 9 Juli sebagai kesalahan bersama tanpa ada tindakan lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena kedua negara ingin membangun hubungan yang baik antara satu sama lain, dan ketegangan antara kedua negara juga dapat menurun.

Diskusi terakhir yang dilakukan oleh presiden Tajikistan dan Kirgistan dalam membahas mengenai kasus April 2021 adalah negosiasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dimana pertemuan kedua belah pihak dilakukan secara langsung di Bishkek, yang kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan yang penting guna menyelesaikan kasus konflik perbatasan yang Tajikistan dan Kirgistan sedang hadapi,

yaitu; (1) Kedua belah pihak sepakat untuk memulihkan “status quo” di perbatasan Tajikistan dan Kirgistan seperti ketika konflik belum terjadi di bulan April 2021. (2) Kedua negara sepakat untuk meningkatkan keamanan dikawasan perbatasan, keduanya sepakat untuk meningkatkan keamanan di perbatasan dan memperkuat kontrol atas wilayah-wilayah yang rawan pecah konflik di perbatasan kedua negara. (3) Membentuk perjanjian mengenai penggunaan senjata api bagi sipil di perbatasan dan sepakat untuk meminta kepada sipil untuk menyerahkan senjata api yang dimiliki kepada otoritas yang berwenang. (5) Kembali membuat kesepakatan mengenai penggunaan air, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai masalah penggunaan atau pendistribusian sumber daya air yang ada di perbatasan Tajikistan dan Kirgistan.

Pemerintah Tajikistan dan Kirgistan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di tahun 2021 tidak memberikan dampak yang besar bagi kawasan perbatasan. Pertama mengenai masalah perbatasan mereka yang kompleks, kedua negara selama melakukan diskusi dan dialog tidak pernah menetapkan garis batas negara mereka yang masih belum jelas. Kedua negara lebih memilih untuk melakukan kerjasama antara negara sebagai salah satu jalan keluar dari permasalahan konflik yang mereka hadapi, jalan yang ditempuh oleh pemerintah Tajikistan dan Kirgistan lebih pada pendekatan rasa saling ketergantungan satu sama lain dengan harapan konflik di perbatasan tidak terjadi lagi.

### **Kesimpulan**

Dalam kasus konflik perbatasan yang dialami oleh Tajikistan dan Kirgistan yang kembali terjadi pada tahun 2021 membuat hubungan kedua negara kembali bersitegang karena kasus perebutan sumber daya alam diperbatasan yang mengakibatkan konflik sipil dan militer. Sehingga membuat pihak Tajikistan dan Kirgistan pada masa deeskalasi konflik dengan cepat melakukan diskusi dan negosiasi untuk mewujudkan gencatan senjata, akan tetapi gencatan senjata yang telah disepakati oleh kedua negara tidak sejalan dengan apa yang terjadi di perbatasan kedua negara, militer yang ada di perbatasan masih terus terlibat dalam konflik di beberapa titik meskipun tidak sebesar konflik yang terjadi pada 28-29 April 2021.

Dalam proses penyelesaian konflik yang ada, Tajikistan dan Kirgistan banyak menghadapi dinamika dalam prosesnya, hal ini terjadi karena apa yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak tidak diterapkan dikawasan perbatasan tempat dimana konflik terjadi, seperti banyaknya insiden militer yang terjadi pasca gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua negara. Selain itu, kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak mengenai konflik yang mereka hadapi tidak secara langsung mengatasi mengatasi masalah yang ada. Hal ini terjadi karena Tajikistan dan Kirgistan selama berdiskusi tidak dapat menemukan kesepakatan atas permasalahan yang negara mereka hadapi. Hal ini terjadi karena masalah utama dalam konflik yaitu masalah penentuan garis batas negara mereka tidak menjadi bahasan utama dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi pada tahun 2021.

Selama negosiasi pihak Tajikistan dan Kirgistan tidak menemukan titik temu mengenai ketidaksepakatan radikal dari permasalahan konflik yang mereka hadapi. Sehingga kebijakan bersama untuk membangun perdamaian di kawasan perbatasan tidak akan bertahan lama, karena masalah utamannya belum diselesaikan dan masalah

yang selesai hanya pada permasalahan yang ada di permukaan saja. Akan tetapi terdapat usaha-usaha yang seharusnya efektif untuk membangun perdamaian kedua negara. Dimana pada akhir diskusi pada Agustus 2021 kedua negara sepakat untuk terus membahas lebih lanjut mengenai isu demarkasi dan delimitasi mengenai garis batas negara sehingga kasus-kasus konflik yang terjadi diperbatasan tidak terjadi lagi dimasa medatang.

Dimana hasil diskusi yang paling signifikan yang berhasil disepakati oleh kedua negara adalah; (1) Kedua belah pihak sepakat untuk memulihkan status quo di perbatasan Tajikistan dan Kirgistan seperti ketika konflik belum terjadi di bulan April 2021. (2) Kedua negara sepakat untuk meningkatkan keamanan dikawasan perbatasan, keduanya sepakat untuk meningkatkan keamanan di perbatasan dan memperkuat kontrol atas wilayah-wilayah yang rawan pecah konflik di perbatasan kedua negara. (3) Membentuk perjanjian mengenai penggunaan senjata api bagi sipil di perbatasan dan sepakat untuk meminta kepada sipil untuk menyerahkan senjata api yang dimiliki kepada otoritas yang berwenang. (4) Kembali membuat kesepakatan mengenai penggunaan air, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai masalah penggunaan atau pendistribusian sumber daya air yang ada di perbatasan Tajikistan dan Kirgistan.

**Daftar Pustaka**

- Aljazeera. (2021). *Kyrgyzstan, Tajikistan agree new ceasefire after border clashes*. <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/1/kyrgyzstan-accuses-tajikistan-of-amassing-troops-near-border>: ALJAZEERA.
- Andriansyah, R. (2021). *Terkuak, Perang Kirgistan-Tajikistan Meletus Gara-gara Rebutan Air*. <https://www.viva.co.id/militer/militer-dunia/1369004-terkuak-perang-kirgistan-tajikistan-meletus-gara-gara-rebutan-air?page=1>: VIVA.co.id.
- GIZ. (2014). *Basseynovi plan reki Isfara. Batkenskii raion Kyrgyzskaia Respublika ( The Isfara River Basin Plan in the Batken District of the Kyrgyz Republic)*. Bishkek: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. <http://docplayer.com/-29223440-Finansirovanie-evropeyskiy-soyuz-basseynovy-plan-reki-isfara-batkenskiy-rayon-kyrgyzskaya-respublika.html>.
- Government of Tajikistan. (2021). *Press statement on the results of the Tajik-Kyrgyz talks within the framework of the official visit of the President of the Kyrgyz Republic Sadyr Japarov to Tajikistan*. Dushanbe, <http://president.tj/ru/node/26048>: President of The Republic of Tajikistan.
- Martin, S. (2021, August 9). *Assesing the April 2021 Conflict Between Tajikistan and Kyrgyzstan and the Impotency of Regional International Organizations*. hal. <https://divergentoptions.org/2021/08/09/assessing-the-april-2021-conflict-between-tajikistan-and-kyrgyzstan-and-the-impotency-of-regional-international-organizations/>.
- Olimov, S. O. (2022). *Post-Soviet Borders; A Kaleidonscop of Shifting Lives and Lands Paper*. *ResearchGate*, 187-201.
- Pannier, B. (2021). *Neighbors Stake Out Positions After Deadly Kyrgyz-Tajik Border Conflict*. <https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-kyrgyzstan-tajikistan-border-conflict-neighbors-stances/31247967.html>: Radio Free Europe.
- Putz, C. (2021). *Back to Normal Diplomacy: Kyrgyz President Visits Tajikistan*. <https://thediplomat.com/2021/07/back-to-normal-diplomacy-kyrgyz-president-visits-tajikistan/>: The Diplomat.
- Ramsbotham, H. M. (2011). *Contemporary Conflict Resolution*. Politi : <https://books.google.co.id/books?id=-IbuQE02-KkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Ravees, M. (2005). *locating danger: conflictologia and the search for fixity in the Ferghana Valley Borderlandas. Central Asia Survey*, [https://www.researchgate.net/publication/280796522\\_Water\\_Conflict\\_and\\_International\\_Cooperation](https://www.researchgate.net/publication/280796522_Water_Conflict_and_International_Cooperation).
- Reuters. (2021). *Russia to reinforce military base in Tajikistan - report*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/russia-reinforce-military-base-tajikistan-report-2021-07-21/>: Reuters.
- RFE/RL Kyrgyz Service. (2021). *Kyrgyzstan, Tajikistan Withdraw Military Units From Border After Deadly Armed Clashes. RadioFreeEurope*, <https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-tajikistan-border-deadly-clashes-withdrawal/31235306.html>.
- Sheng, Y. (2021). *China, Central Asian countries to strengthen cooperation on Afghan issue, counterterrorism and diversify energy sources*. <https://www.globaltimes.cn/page/202105/1223313.shtml>: Global Times.
- Sullivan, C. J. (2021). *Battle At The Border: An Analysis of The 2021 Kyrgyzstan-Tajikistan Conflict. Asian Affairs*, <https://doi.org/10.1080/03068374.2021.1940587>.
- Sultanalieva, J. P. (2021). *Civilians Harmed in Kyrgyzstan, Tajikistan Border Clashes : Both side should be Abide by Laws of War*. <https://www.hrw.org/news/2021/04/30/civilians-harmed-kyrgyzstan-tajikistan-border-clashes>: Human Rights Watch.
- Toktomushev, K. (2017). *Promoting Social Cohesion and Conflict Mitigation: Understanding conflict in the Cross border areas of Kyrgyzstan and Tajikistan. Institute of Public Policy and Administration*.
- Toktomushev, K. (2018). *Understanding Cross-Border Conflict in Post-Soviet Central Asia: The Case of Kyrgyzstan and Tajikistan. The Quarterly Journal*, <https://doi.org/10.11610/Connections.17.1.02>.

Williamson, S. S. (2021). *After Kyrgyzstan-Tajikistan Border Conflict, Time For a Human Rights Agenda*.  
<https://www.hrw.org/news/2021/05/21/after-kyrgyzstan-tajikistan-border-conflict-time-human-rights-agenda>: Human Rights Watch.